

# BAB I

## PENDAHULUAN

Negara Cina adalah sebagai salah satu Negara yang telah lama menjalin kerjasama perdagangan baik dalam forum regional yang berfokus pada ASEAN+ mitra dialog dan APEC, Bilateral yang berorientasi pada peninjauan pengembangan Economic Partnership Agreement (EPA) dan Free Trade Agreement (FTA) yang mempunyai tujuan meningkatkan kerjasama perdagangan kedua pihak dan meliberalisasikan perdagangan barang dan jasa melalui pengurangan atau penghapusan tariff dan mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua pihak dan memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN dan menjembatani adanya konflik yang ada di kedua belah pihak.

Hubungan perdagangan Indonesia dengan RRC mengalami beberapa fase perkembangan berkaitan dengan perkembangan hubungan politik kedua negara yaitu: *Pertama* Masa pembekuan hubungan sejalan dengan pemutusan hubungan diplomatik antara pemerintah kedua negara pada tahun 1967, *kedua* Pembukaan kembali hubungan dagang langsung kedua negara sejak tahun 1985, *ketiga* Peningkatan kerjasama ekonomi dan perdagangan setelah normalisasi hubungan diplomatik pada tahun 1990, ditandai dengan penandatanganan Persetujuan Perdagangan pada tanggal 8 Agustus 1990 di Jakarta dan MOU pembentukan Komisi Bersama mengenai Kerjasama Ekonomi Perdagangan dan Teknik pada

tanggal 17 Nopember 1990 di Jakarta. Sampai saat ini sudah diadakan enam kali Sidang Komisi Bersama, terakhir di Jakarta pada 5 September 2004.

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia, berada di urutan ke 5 sebagai negara tujuan ekspor (ke-4 ekspor non migas) dan ke-3 sebagai sumber impor (migas dan non migas). Sekitar 4,86 % dari total ekspor Indonesia ditujukan ke Cina, dan 10,66% total impor Indonesia berasal dari Cina. Sedangkan bagi Cina, Indonesia adalah negara tujuan ekspor ke 16, sekitar 1% dari total ekspor Cina ditujukan ke Indonesia, dan 1,4% total impor Cina berasal dari Indonesia.

Meskipun terdapat perbedaan data berdasarkan General Administration of Customs of the PRC pada satu dasa warsa terakhir statistik perdagangan Cina – Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dengan peningkatan rata-rata sebesar 15,2% per tahun, dimana Indonesia mencatat surplus pada periode tersebut.

Pada tahun 1991 total nilai perdagangan Cina - Indonesia baru sebesar 1,88 milyar dollar AS dan nilai ini terus mengalami peningkatan menjadi 10,24 milyar pada tahun 2003. Adapun komoditi yang banyak diminati oleh pengusaha Cina adalah : kayu gelondongan, ubin lantai (parquet), minyak kelapa sawit, stearic acid, karet, ikan, tekstil, plastik dan batubara. Secara umum perdagangan Indonesia dengan Cina dalam kondisi surplus dan

besar bagi produk domestik yang dapat bersaing dengan produk sejenis dari pengekspor dunia di pasar Cina.

Indonesia harus meningkatkan daya saing produk perdagangan karena pemerintah telah menyepakati EHP bilateral dengan Cina untuk menurunkan tarif impor. Selain itu juga perlu mewaspadai terjadinya ketergantungan industri olahan dalam negeri terhadap bahan baku yang berasal dari Cina, misalnya minyak kacang kedelai yang tercermin dari kinerja perdagangannya menurun drastis.

Nilai perdagangan Indonesia-Cina pada tahun 1999 mengalami pertumbuhan yang pesat, yaitu naik sebesar 33,1% dibandingkan dengan nilai perdagangan tahun 1998. Menurut catatan CBS ekspor Cina ke Indonesia tahun 2000 sebesar 3,06 milyar dollar AS, naik sebesar 60% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 906 juta dollar AS.

Untuk tahun 2001 sampai bulan September sebesar 2, 12 milyar dollar AS turun 6, 19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2, 18 milyar dollar AS. Neraca perdagangan Indonesia-Cina selama ini menunjukkan surplus untuk Indonesia, yang pada tahun 2000 mencapai nilai sebesar 1,34 milyar dollar AS. Dalam tahun 2000, Indonesia merupakan Negara urutan ke 14 sebagai negara tujuan ekspor Cina, dan urutan ke 13 sebagai negara sumber impor Cina<sup>1</sup>.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dari DKP sejak 2001 sampai 2006 volume ekspor hasil laut

Indonesia ke Cina rata-rata meningkat sampai 52 persen. Sementara dari segi nilai ekspor rata-rata peningkatan 62,45 persen. Pada 2001 volume pengiriman ekspor perikanan ke Cina sebanyak 20.084 ton dengan nilai US\$ 17.712.

Pada 2002 volume ekspor sebanyak 40.799 ton dengan nilai US\$ 25.511 pada 2003 volume ekspor sebanyak 168.108 ton bernilai US\$ 70.093. Lalu pada 2004 volume ekspor sebesar 196.279 ton dengan nilai US\$ 71.371. Pada 2005 volume ekspor sebesar 192.885 ton dengan nilai US\$ 66.036 dan pada 2006 volume ekspor sebesar 109.337 ton dengan nilai US\$ 55,8 juta.

Berdasarkan data Departemen Perdagangan angka ekspor produk perikanan dari Indonesia ke Cina per tahunnya yakni US\$ 60 juta. Pada 2006 pendapatan ekspor Indonesia ke Cina yakni Rp 8,3 miliar dan pendapatan impor yakni Rp 6,6 miliar. Sementara itu berdasarkan data dari Bank Dunia pada tahun 2006 nilai ekspor makanan olahan Indonesia ke Cina sebesar US\$ 90 juta, dan impor Cina ke Indonesia sebesar US\$ 36 juta.

Sementara itu data perdagangan RI dan Cina yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan total nilai impor Indonesia dari Cina untuk semua produk migas dan non migas pada tahun 2005-2007 meningkat 1,13 persen. Pada 2005 volume pengiriman produk sebesar 8,9 juta kilogram (kg) dengan nilai US\$ 5,84 miliar. Pada 2006 volume produk sebesar 8,7 juta kg dengan nilai US\$ 6,63 miliar. Sementara pada bulan Januari sampai April 2007 volume produk sebesar 2,2 juta kg dengan nilai US\$ 2,51 miliar.

Selain impor, total ekspor produk migas dan non migas Indonesia ke Cina meningkat 1,25 persen sejak 2005-2006 Pada 2005 nilai ekspor US\$ 6,62 miliar meningkat di 2006 menjadi US\$ 8,34 miliar<sup>2</sup>.

Sedangkan nilai ekspor sampai April 2007 mencapai US\$ 2,99 miliar. Selain produk hasil laut Indonesia juga mengimpor produk mainan anak dari Cina. Total impor Cina untuk produk mainan anak pada 2005 sampai 2006 juga naik sampai 1,31 persen. Pada 2005 volume produk sebesar 40,43 juta kg dengan nilai US\$ 51,87 juta. Pada 2006 volume produk sebesar 48,79 juta kg dengan nilai US\$ 68,23 juta, dan pada Januari sampai April 2007 volume produk sudah mencapai 15,81 juta dengan nilai US\$ 21,79 juta.

Saat ini daya tawar pemerintah Indonesia dituding sebagai biang keladi yang menyebabkan Cina bisa berlaku semena-mena dalam hal perdagangan dengan Indonesia. Temuan dan pemberitaan mengenai berbahayanya produk-produk asal Cina pun segera meluas ke seluruh penjuru dunia. Banyak orang mencurigai bahkan tidak percaya lagi pada produk Cina termasuk pemerintah Indonesia. Alhasil Indonesia pun mengeluarkan daftar tentang 39 makanan Cina yang mengandung formalin. Anehnya langkah tersebut justru ditanggapi Cina dengan memberlakukan larangan impor atas sejumlah produk makanan dari Indonesia khususnya produk-produk makanan laut.

Cina saat ini merupakan negara dengan pertumbuhan tertinggi di dunia selain India. Pertumbuhan ekonomi mereka mendekati 10 persen. Sektor riil

---

<sup>2</sup> *Pemerintah Perlu Pertegas Penggunaan Formalin*, diakses pada tanggal 17 April 2008 tersedia di <http://www.technologyindonesia.com>

bertumbuh dan bergairah di mana-mana sehingga investasi besar-besaran masuk ke negara itu. Jika kita melakukan perang dagang dengan Cina akan banyak mempengaruhi Indonesia. Cina sekarang merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Angkanya mencapai 10 persen walaupun tahun ini diperkirakan sedikit lebih lambat. Semua sektor ekonomi negara itu bergerak kencang. Investasi juga meningkat signifikan.

Dampak paling berat terutama penurunan citra produk perikanan Indonesia di pasar global. Pemerintah Cina melakukan pelarangan impor makanan laut dari Indonesia sejak 3 Agustus 2007 karena terindikasi mengandung logam berat, seperti merkuri dan kadmium serta residu obat-obatan yang dilarang. Kerugian sudah pasti akan lebih banyak dialami Indonesia. Selama lima tahun terakhir volume ekspor produk perikanan ke negara tersebut meningkat 52 persen dengan nilai 55,8 juta dolar AS dan volume 109.337,7 ton<sup>3</sup>.

Bahkan dari nilai perdagangan saja antara Cina dan negara-negara Asia Tenggara (Asean) semester satu tahun ini mencapai 92,1 miliar dolar AS atau meningkat 26,6 persen dibanding tahun lalu. Kemudian tahun depan akan mencapai 200 miliar dolar AS. Agar perang dagang ini tidak mengecilkan nilai ekspor Indonesia ke negara tersebut perlu ada media dan penjelasan antara kedua belah pihak. Indonesia dan Cina harus duduk satu meja dalam satu forum.

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan fokus bahasan ini adalah:

**“Bagaimanakah Strategi Indonesia dalam mengatasi larangan ekspor ikan Indonesia ke Cina”.**

## **C. Kerangka Pemikiran/Teori yang Digunakan**

Dalam menganalisa suatu permasalahan yang kita hadapi dalam Ilmu Hubungan Internasional diperlukan teori dan konsep. Teori adalah bentuk penjelasan paling umum yang memberi tahu mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bisa diduga bakal terjadi, jadi selain dipakai untuk eksplanasi teori juga menjadi dasar prediksi<sup>4</sup>.

Sedangkan konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obtek atau suatu fenomena tertentu. Konsep dalam ilmu sosial menunjukkan pada sifat-sifat dari obyek yang dipelajarinya ( misalnya orang, kelompok, Negara atau organisasi internasional ) yang relevan untuk menyelesaikan kasus ini. Dalam hal ini penulis menggunakan konsep kepentingan nasional dan teori diplomasi.

### **1. Konsep Kepentingan Nasional**

Di dalam pergaulan internasional setiap negara tidak bisa melepaskan diri dari hubungan antar negara yang melintasi batas negara di mana setiap negara memiliki masalah yang begitu kompleks

dengan negara lain, juga memiliki potensi yang sangat besar terhadap kelangsungan umat manusia di muka bumi ini. Untuk itu diperlukannya hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, karena hubungan tersebut sangat kompleks di mana setiap segi dari hubungan ini memerlukan koordinasi yang tidak sederhana, karena bangsa lain juga memiliki kedaulatan. Suatu negara melakukan hubungan dengan negara lain dengan tujuan meningkatkan hubungan serta kerjasama ekonomi dan perdagangan karena pada umumnya setiap negara yang terlibat dalam kerjasama itu mempunyai kepentingan untuk mengejar kepentingan nasional masing-masing negara. Terlibatnya suatu negara dalam masalah pemulihan ekonomi nasional khususnya dalam meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan luar negeri terutama guna mendorong ekspor nonmigas dan didasarkan pada negara tersebut mempunyai hubungan dengan negara tujuan ekspor tersebut dan juga negara tersebut mempunyai kepentingan nasional.

Hubungan Internasional yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, pada hakekatnya akan membentuk tiga pola hubungan, yaitu: kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*) dan konflik (*conflict*) antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya persamaan dan perbedaan kepentingan nasional di antara negara-negara atau bangsa di dunia.

Hubungan Internasional merupakan landasan bagi negara-negara atau

bangsa di seluruh dunia dalam meningkatkan kohesifitas dengan negara lainnya.

KJ. Holsti mengemukakan tentang istilah Hubungan Internasional sebagai berikut:

“Istilah hubungan internasional mengacu kepada semua bentuk interaksi antar anggota masyarakat yang berlainan, baik yang di sponsori oleh pemerintah maupun tidak, hubungan internasional akan meliputi analisa kebijakan luar negeri atau proses-proses antar bangsa menyangkut segala hubungan itu”<sup>5</sup>.

Dalam pembahasan yang berhubungan dengan masalah internasional diperlukan suatu konsep dan teori sebagai landasan berpikir. Untuk itu masalah internasional tidak mungkin begitu saja meninggalkan sistem internasional. Menurut KJ. Holsti, sistem internasional adalah sebagai berikut:

“Sistem internasional dapat didefinisikan sebagai kumpulan kesatuan politik yang independen seperti suku, negara, kota, bangsa dan kerajaan, yang berinteraksi dalam frekuensi tinggi dengan proses yang teratur, para pengkaji mempunyai pengertian untuk menjelaskan keistimewaan atau karakteristik perilaku unit politik tersebut satu sama lain dan menerangkan berbagai perubahan besar dalam interaksinya”<sup>6</sup>.

Dalam konteks hubungan internasional adanya sistem internasional jelas sangat diperlukan untuk mengatur segala aspek kehidupan dalam tatanan internasional, dalam sistem internasional

jelas akan adanya politik-politik dari sebuah negara menjadi politik internasional, J. C. Johari mengatakan bahwa:

“Politik Internasional merupakan salah satu kajian yang penting dalam studi hubungan internasional dan negara sebagai pelaku, berinteraksi dalam suatu sistem internasional, politik internasional peduli akan perdamaian power atau dengan kata lain politik internasional lebih menitikberatkan pada sisi konflik dari suatu negara sebagai actor yang berdaulat”<sup>7</sup>.

Perkembangan keadaan internasional akan mempengaruhi kebijakan politik luar negeri suatu negara baik itu kebijakan politik, ekonomi, sosial-budaya mapun pertahanan dan keamanan. Dari uraian di atas jelas bahwa politik luar negeri suatu negara merupakan dasar bagi posisi dan sikap masing-masing negara atau kelompok-kelompok negara dalam hubungan internasional yang diimplementasikan untuk kepentingan nasional negara tersebut.

Politik luar negeri suatu negara tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kepentingan nasional bangsa tersebut, karena kepentingan nasional merupakan salah satu terbentuknya suatu kebijakan politik luar negeri di mana Indonesia dalam hal ini lebih menekankan pada kekuatan dalam negerinya untuk menguatkan unsur domestiknya khususnya pada ekonomi dan perdagangan. Dalam hal ini Miriam Budiarjo mengatakan:

“Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu”<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> J. C. Johari, *International Relations and Politics*, 1985, hal. 9.

<sup>8</sup> Miriam Budiarjo, *Politik Luar Negeri*, hal. 12.

Menurut B. N. Marbun kebijakan diartikan sebagai berikut:

“Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi; pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran”<sup>9</sup>.

Teori pembuatan kebijakan luar negeri yang diungkapkan William D. Coplin menyangkut beberapa hal sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Situasi politik domestik, termasuk faktor budaya sebagai dasar tingkah laku politik
2. Situasi ekonomi dan militer domestik, termasuk faktor geografis yang selalu mendasari pertimbangan pertahanan keamanan
3. Konteks International, yaitu pengaruh negara-negara lain atau konsentrasi politik Internasional.

Kebijakan suatu negara baik yang bersifat ke dalam atau ke luar di buat untuk mencapai suatu tujuan nasional. Sedangkan menurut Paul Scabury dalam bukunya *Power, Freedom and Diplomacy* yang dikutip oleh KJ. Holsti dalam bukunya *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis* bahwa yang dimaksud tujuan nasional, adalah:

“Istilah tujuan nasional berkaitan dengan beberapa kumpulan cita-cita atau tujuan suatu bangsa yang berusaha dicapainya melalui hubungan dengan negara lain. Dengan kata lain, bahwa pengertian ini merupakan konsep umum tujuan nasional dan bersifat normative. Pengertian lain yang bersifat deskriptif

<sup>9</sup> B. N. Marbun, kamus politik, CV Muliasari, Jakarta, 2003 hal. 263.

<sup>10</sup> William D. Coplin, Introduction in International Politics, A Theoretical Overview (terjemahan M.

tujuan nasional dianggap sebagai tujuan yang harus dicapai suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah”<sup>11</sup>.

## 2. Diplomasi

Dalam Oxford Dictionary, diplomasi didefinisikan sebagai “the management of international relations by negotiations.” Batasan ini memberi pengertian bahwa diplomasi merupakan sebuah proses, yaitu pengelolaan hubungan antar negara melalui perundingan-perundingan. Dikatakan proses karena manajemen mencakup proses *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *directing* (pengarahan), *executing* (pelaksanaan) dan evaluasi.

Untuk menciptakan peningkatan kerjasama perdagangan internasional diperlukan sarana diplomasi yang bertumpu pada kerjasama tingkat multilateral, regional dan bilateral karena diplomasi merupakan teori dalam hubungan internasional dalam penyelesaian masalah sehingga dapat tercipta kesepakatan. Diplomasi biasa dipakai oleh suatu negara untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Diplomasi dalam artian lebih dekat diplomasi sebagai alat komunikasi. Demikian diplomasi diarahkan untuk memaksimalkan/meningkatkan pencapaian kepentingan nasional.

Diplomasi diyakini berasal dari kata Yunani “Diploun” yang berarti melipat. Konsep ini menunjukkan pada semua dokumen resmi

negara yang dicetak pada piringan logam dobel dan dilipat. Konsep diplomasi ini kemudian meluas hingga menyangkut perjanjian-perjanjian dengan bangsa lain, termasuk berkembang di masa modern menjadi manajemen hubungan internasional<sup>12</sup>.

Diplomasi oleh *The Chamber's Twentieth Century Dictionary* diartikan sebagai "*The art of negotiation, especially of treaties between states; political skill*" (Seni berunding khususnya tentang perjanjian diantara negara-negara; keahlian politik).<sup>13</sup> Menurut Harold Nicholson, diplomasi mencakup 5 hal:

- 1) Politik luar negeri
- 2) Negosiasi
- 3) Mekanisme pelaksanaan
- 4) Cabang dinas luar negeri.

Dengan kerangka 5 hal tersebut, Nicholson kemudian menginterpretasikan lebih jauh dalam pelaksanaan negosiasi internasional bahkan dalam arti yang buruk mencakup tindakan licik<sup>14</sup>.

Sedangkan Muldoon mendefinisikan diplomasi sebagai metode yang digunakan oleh negara bangsa, melalui lembaga yang berwenang untuk mengadakan hubungan timbal balik (*mutual relations*)

---

<sup>12</sup> ... ..

Berkomunikasi dengan yang lain dan juga untuk melangsungkan kerjasama politik, ekonomi, dan hukum<sup>15</sup>.

Di dalam pembicaraan sehari-hari, diplomasi mempunyai arti yang berbeda-beda. Praktik Diplomasi mensyaratkan adanya batasan dari kebijakan luar negeri. Kebijakan semacam itu di buat dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti geografi, kebutuhan ekonomi dan sumber daya, strategi dan keperluan pertahanan, adanya persekutuan dengan negara lain, dan lain sebagainya<sup>16</sup>.

Sedangkan menurut Sir Victor Wellesley dalam bukunya *Diplomacy in Fetters* yang dikutip oleh Sumaryo Suryokusumo dalam bukunya *Praktik Diplomasi*, bahwa:

“Diplomasi bukanlah merupakan kebijakan, tetapi merupakan lembaga untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan tersebut. Namun diplomasi dan kebijakan keduanya saling melengkapi karena seseorang tidak akan dapat bertindak tanpa kerja sama satu sama lain. Diplomasi tidak dapat dipisahkan dari politik luar negeri, tetapi keduanya bersama-sama merupakan kebijakan eksekutif-kebijakan untuk menetapkan strategi, diplomasi, dan taktik”<sup>17</sup>.

Diplomasi menurut Jack C. Plano dan Roy Olton dalam buku *The International Relations Dictionary* yang dikutip oleh Sumaryo Suryokusumo dalam buku *Praktik Diplomasi* mengatakan bahwa:

“Diplomasi berkaitan dengan seluruh proses dalam hubungan luar negeri, termasuk perumusan kebijakan

---

<sup>15</sup> James P. Muldoon, *Multilateral Diplomacy And The United Nation Today*, Westview Press, Oxford, 1999, hal. 1

<sup>16</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Praktik Diplomasi*, bpIblam, Jakarta, 2004, hal. 7.

<sup>17</sup> Victor Wellesley, *Diplomacy in Fetters*, 1944, hal. 10 yang dikutip oleh Ibid Sumaryo

dan pelaksanaannya. Dalam arti luas, Diplomasi dan politik luar negeri suatu negara adalah sama, namun dalam arti yang lebih sempit dan tradisional, diplomasi terkait dengan cara-cara dan mekanisme, sedangkan politik luar negeri menyangkut tujuan dan maksud. Dalam arti yang lebih terbatas ini, maka diplomasi mencakup teknik operasional di mana suatu negara mencari kepentingan kepentingannya di luar yuridiksinya”<sup>18</sup>.

Ada baiknya untuk membedakan kebijakan luar negeri atau politik luar negeri dengan diplomasi. Hubungan keduanya yang sangat erat membentuk dan menciptakan peran suatu negara dalam politik internasional. Kadang-kadang sangat sukar dalam praktiknya untuk dibedakan satu sama lain.

Hal ini bisa terjadi jika seseorang menyetujui pandangan bahwa kebijakan tersebut merupakan sesuatu yang dianut oleh pemerintahannya, sesuai dengan pepatah bahwa perbuatan itu lebih berarti daripada kata-kata. Politik luar negeri suatu negara lazimnya akan terdiri dari tujuan dan prinsip-prinsipnya di mana negara itu berusaha untuk meningkatkan urusan-urusan internasional.

Pada umumnya prinsip dan tujuan tersebut dinyatakan secara terbuka atau dapat disimpulkan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Diplomasi adalah cara dimana pemerintah berusaha mencapai tujuan dan mendapatkan dukungan dari prinsip-prinsip tersebut. Hal itu merupakan proses politik, di mana politik luar negeri suatu negara pertama-tama dipertaruhkan, kemudian diarahkan untuk

---

<sup>18</sup> Jack C. Plano dan Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, Fourth Edition Longman California, 1998, hal. 241 yang dikutip oleh Ikid Sumarmo, hal. 53

tujuan dan prinsip tersebut untuk mempengaruhi kebijakan dan sikap dari negara lain<sup>19</sup>.

Sebagai sebuah proses komunikasi diplomasi mempunyai 3 elemen penting: Negosiasi, Pertanda, dan Diplomasi Publik. Negosiasi dapat terjadi ketika dua atau lebih aktor berkomunikasi antara satu dan yang lainnya. Baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (lewat perantara).

Pertanda menunjuk pada perkataan atau perbuatan yang ditujukan untuk mengirim pesan kepada pemerintah lain. Sedangkan Diplomasi Publik merupakan pergeseran model komunikasi tradisional antar pemerintah<sup>20</sup>.

Sedangkan cara-cara yang digunakan menurut Morgenthau ada tiga: Persuasi, Kompromi, dan Ancaman Kekuatan<sup>21</sup>.

Meskipun tinjauan politik sering dijadikan pertimbangan utama dalam khazanah diplomasi, akan tetapi seiring dengan bergesernya wacana hubungan internasional dimulai dengan berakhirnya perang dingin, diplomasi mengemban misi baru yaitu misi diplomasi ekonomi dalam bentuk yang lebih spesifik adalah perdagangan. Babak ini dimulai semenjak semakin intensifnya wacana ekonomi dan perdagangan internasional dalam studi maupun praktek diplomasi modern. Bahkan diplomasi multilateral pun semakin didominasi oleh isu-isu ekonomi dan perdagangan internasional.

---

<sup>19</sup> Op Cit Sumaryo Suryokusumo, hal. 56.

<sup>20</sup> John T. Rourke, Mark A. Bowyer. *International Politics On The World Stage*

<sup>21</sup> *International Politics: A Realist Approach*, 1991

Dengan semakin besarnya perdagangan dua arah yang terjadi agenda perdagangan internasional sekarang yang berada di bawah kontrol WTO bergerak semakin cepat. Sehingga isu perdagangan mampu menggeser peranan isu-isu yang ada pada masa lalu berada pada lingkup domestik atau minimal tidak berhubungan dengan perdagangan internasional<sup>22</sup>.

Sebagai gantinya misi-misi diplomasi di titikberatkan pada isu-isu yang sifatnya non-ideologis seperti ekonomi dan perdagangan internasional. Sejak berakhirnya perang dingin, maka isu-isu diplomasi berada pada seputaran ketergantungan ekonomi dan sengketa dagang.

Diplomasi perdagangan merupakan salah satu instrumen penting yang menentukan dalam memperjuangkan kepentingan nasional guna memperoleh akses pasar internasional khususnya dalam era sistem perdagangan multilateral (WTO). Partisipasi Indonesia dalam berbagai perundingan internasional baik dalam forum multilateral, regional dan bilateral berkembang sangat cepat dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial dan politik Indonesia.

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan di atas, maka penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis. Hipotesis dapat

---

<sup>22</sup> James P. Muldoon, Jr., et. al. *Multilateral Diplomacy and The United Nation Today*, Westview Press, Colorado 1999, hal. 88

diartikan sebagai dugaan awal atau jawaban sementara terhadap permasalahan, maka penulis merumuskan hipotesis bahwa strategi Indonesia dalam mengatasi larangan ekspor ikan Indonesia ke Cina adalah:

1. Dengan cara menawarkan pengaturan saling mengakui atau mutual recognition arrangement / MRA dengan Cina, untuk menghindari penghentian impor sementara produk perikanan Indonesia di masa mendatang.
2. Melakukan Diplomasi Dengan Menggunakan Pendekatan dan Negosiasi dengan Pemerintah Cina.

#### **E. Jangkauan Penelitian**

Dalam upaya untuk membatasi pembahasan agar tidak terlalu luas dan semakin kabur maka penulis memberikan batasan pembahasan pada hubungan perdagangan Indonesia dengan Cina dalam mengatasi larangan ekspor produk perikanan ke Cina.

#### **F. Metode Penelitian**

Agar memudahkan dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa cara yaitu :

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mencari informasi yang dibutuhkan adalah: Metode Kepustakaan (*Library Research*) adalah mengumpulkan data atau informasi dengan cara

membaca atau mempelajari buku-buku referensi, majalah ilmiah, dan buku-buku teks yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini berupa data sekunder dari literatur (buku, jurnal ilmiah, media cetak dan situs internet).

## G. Sistematika Penulisan

Secara mendasar bahwa tulisan ini terdiri dari lima bab, antara lain:

**BAB I PENDAHULUAN**, meliputi alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, perumusan masalah, hipotesa, kerangka konseptual, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II HUBUNGAN PERDAGANGAN INDONESIA – CINA**

Bab ini mengulas tentang sejarah hubungan perdagangan Indonesia dengan Cina sebelum adanya larangan ekspor ikan ke Cina termasuk komoditi ekspor Indonesia ke Cina dan komoditi Impor dari Cina ke Indonesia serta penghentian ekspor sementara produk perikanan Indonesia.

## **BAB III PEMBENTUKAN KEMITRAAN STRATEGIS ANTARA INDONESIA DAN CINA**

Bab ini Mengulas tentang penawaran pengendalian mutu produk ekspor antara kedua negara.

**BAB IV STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI  
LARANGAN EKSPOR IKAN INDONESIA KE CINA**

Bab ini Menjelaskan tentang upaya yang akan digunakan oleh Indonesia dalam mengatasi larangan ekspor ikan ke Cina.

**BAB V KESIMPULAN**

Bab ini Merupakan inti dari bab-bab sebelumnya sekaligus sebagai penutup dari penyusunan skripsi ini. Merupakan penegasan kembali atas jawaban dari pertanyaan yang ada pada pokok permasalahan dan pembuktian hipotesa.